



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKUS PROGRAM, NOMENKLATUR KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
DAN RINCIAN SUB KEGIATAN (RSK) SERTA NILAI ALOKASI DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) FISIK DAN NONFISIK BIDANG KESEHATAN PADA DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN UNIT PERANGKAT DAERAHNYA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui pencapaian target Indikator Standar Pelayanan Minimal yang merupakan prioritas pembangunan kesehatan nasional;
- b. bahwa Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional;
- c. bahwa berdasarkan alokasi hasil rincian kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Lokus Program, Nomenklatur Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Rincian Sub Kegiatan (RSK) Serta Nilai Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik Bidang Kesehatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Unit Perangkat Daerahnya Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2018;
11. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.07/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN LOKUS PROGRAM, NOMENKLATUR KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN RINCIAN SUB KEGIATAN (RSK) SERTA NILAI ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK DAN NONFISIK BIDANG KESEHATAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN UNIT PERANGKAT DAERAHNYA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Daftar rincian nilai alokasi pagu alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Unit Perangkat Daerah Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lingkup penggunaan dan Penetapan nilai alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik bidang kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Unit Pelaksana Teknisnya pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

a. DAK Fisik Penugasan

- 1) Penguatan Intervensi Stunting
- 2) Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

b. DAK Fisik Reguler

- 1) Pelayanan Dasar
- 2) Pelayanan Kefarmasian dan Bahan habis Pakai
- 3) Kesiapan Peningkatan Sistem Kesehatan

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi, Kesehatan terdiri dari :

- 1) Kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Provinsi;
- 2) Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit;

b. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian dan Alat Kesehatan, terdiri dari :

- 1) Biaya distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai dari Instansi Farmasi Provinsi ke Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.

c. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, terdiri dari :

- 1) Pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah kerja;
- 2) Kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat Puskesmas;
- 3) Upaya Deteksi dini, Preventif dan Respon Penyakit;
- 4) Pemicuan STBM Desa/Kelurahan Prioritas.

d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Stunting, terdiri dari:

- 1) Penyusunan Regulasi Daerah Terkait Stunting;
- 2) Pemetaan dan Analisis Situasi Program Stunting;
- 3) Pembinaan Kader Pembangunan Manusia;
- 4) Pengukuran dan Publikasi Stunting;
- 5) Pencatatan dan Pelaporan (termasuk dokumentasi) Intervensi dan hasil;
- 6) Reviu Kinerja Tahunan Aksi Integrasi Stunting.

KETIGA : Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan masing Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sesuai peraturan Permendagri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001

Tembusan :

1. Wakil Kepala Dinas Kesehatan;
2. Sekretaris Dinas Kesehatan;
3. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Kesehatan;
4. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten;
5. Para Direktur RSUD Terkait;
6. Para Kepala Puskesmas Kecamatan.

PENETAPAN LOKUS PROGRAM, NOMEKLATUR KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN RINCIAN SUB KEGIATAN (RSK) SERTA NILAI ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK
BIDANG KESEHATAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN UNIT PELAKSANA PERANGKAT DAERAHNYA
TAHUN ANGGARAN 2021

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Kategori Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi dan (BOK) Kelafmasian dan Alat Kesehatan										
No.	SKPD/UKPD	KATEGORI	LOKUS PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN (RSK)	SEKSI/BIDANG	RINCIAN SUB KEGIATAN PER SEKSI/BIDANG (Rp)	TOTAL NILAI ALOKASI PER RINCIAN SUB KEGIATAN	TOTAL NILAI PER KATEGORI (Rp)
1	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	BOK Provinsi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Lintas	Kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Provinsi (DAK Nonfisik BOK Provinsi)	Gizi, Promosi Kesehatan dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Kesmas)	122.100.000	1.802.357.000	
							Kesehatan Keluarga (Kesmas)	665.500.000		
							Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga / Kesling (Kesmas)	405.127.000		
							Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga/Kesjaor (Kesmas)	405.430.000		
							Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional (Yankes)	204.200.000		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respons Penyakit (DAK Nonfisik BOK Provinsi)	Penyakit Menular Tular Vektor dan Zoonotik / PMTVZ (P2)	346.800.000	1.065.800.000	
							Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza/PTMKJN(P2)	277.700.000		
							Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi (P2)	441.300.000		
2	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	BOK Kelafmasian Dan Alat Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan,Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Biaya distribusi obat, vaksin, data dan bahan medis habis pakai dari instalasi Farmasi Provinsi ke Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota (DAK Nonfisik Farmalkes)	Kelafmasian (SDK)	79.430.000	79.430.000	79.430.000
Jumlah										2.947.587.000

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001

PENETAPAN LOKUS PROGRAM, NOMENKLATUR KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN RINCIAN SUB KEGIATAN (RSK) SERTA NILAI ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN UNIT PERANGKAT DAERAHNYA
TAHUN ANGGARAN 2021

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Kategori Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Stunting												
NO.	SKPD/UKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN (RSK)							
					Penyusunan Regulasi Daerah Terkait Stunting	Pemetaan dan Analisis Situasi Program Stunting	Pelaksanaan Rembuk Stunting	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia	Pengukuran dan Publikasi Stunting	Pencatatan dan Pelaporan	Reviu Kinerja Tahunan Aksi Integrasi Stunting	TOTAL NILAI (Rp)
1	SUKU DINAS KESEHATAN JAKARTA PUSAT	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	30.950.000	99.345.000	33.115.000	512.674.000	34.915.000	30.050.000	33.115.000	774.164.000
2	SUKU DINAS KESEHATAN JAKARTA UTARA				26.852.000	114.608.000	53.912.400	500.730.200	87.756.000		57.418.400	841.277.000
3	SUKU DINAS KESEHATAN JAKARTA BARAT				37.210.000	42.310.000	37.210.000	576.961.000	37.210.000	132.330.000	27.916.000	891.147.000
4	SUKU DINAS KESEHATAN JAKARTA SELATAN				26.920.000	45.150.000	26.920.000	594.680.000	100.320.000	38.791.000	34.420.000	867.201.000
5	SUKU DINAS KESEHATAN JAKARTA TIMUR				105.314.000		100.848.000	543.062.000		183.407.000		932.631.000
6	SUKU DINAS KESEHATAN KAB.ADM. KEP. SERIBU					22.570.000	32.745.000	279.654.000	22.570.000	16.915.000	31.335.000	405.789.000
	Jumlah				227.246.000	323.983.000	284.750.400	3.007.761.200	282.771.000	401.493.000	184.204.400	4.712.209.000

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, f


WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001

TAHUN ANGGARAN 2021

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Kategori Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas									
NO.	SKPD/UKPD	LOKUS PROGRAM	Program Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP) Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Total Nilai (Rp)
		NOMENKLATUR KEGIATAN	Advokasi, Pem berdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten / Kota	Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit	Pemicuan STBM desa/keurahan prioritas			
		RINCIAN SUB KEGIATAN (RSK)	Pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah kerja	Kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat Puskesmas	Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit	Pemicuan STBM desa/keurahan prioritas			
		P U S A T	32.100.000	956.891.000	479.008.000				1.467.999.000
1		Puskesmas Kec. Cempaka Putih		105.150.000	24.900.000				130.050.000
2		Puskesmas Kec. Gambir		97.800.000	12.000.000				109.800.000
3		Puskesmas Kec. Johar Baru		52.050.000	137.550.000				189.600.000
4		Puskesmas Kec. Kemayoran		197.690.000	15.080.000				212.770.000
5		Puskesmas Kec. Menteng	32.100.000	130.944.000	109.600.000				272.644.000
6		Puskesmas Kec. Sawah Besar		159.600.000	48.600.000				208.200.000
7		Puskesmas Kec. Senen		74.540.000	100.050.000				174.590.000
8		Puskesmas Kec. Tanah Abang		139.117.000	31.228.000				170.345.000
		U T A R A	100.073.267	909.342.266	574.496.467	30.000.000			1.613.912.000
9		Puskesmas Kec. Cilincing	34.200.000	158.616.000	210.664.000	22.500.000			425.980.000

NO.	LOKUS PROGRAM		Program Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				Total Nilai (Rp)
	NOMENKLATUR KEGIATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
		SUB KEGIATAN	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten / Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
	RINCIAN SUB KEGIATAN (RSK)	Pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah kerja	Kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat Puskesmas	Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit	Pemicuan STBM desa/keurahan prioritas			
10	Puskesmas Kec. Kelapa Gading	2.350.000	96.320.000	46.582.000		145.252.000		
11	Puskesmas Kec. Koja		141.169.000	52.500.000		193.669.000		
12	Puskesmas Kec. Pademangan		73.683.000	103.847.000		177.530.000		
13	Puskesmas Kec. Penjarangan	63.523.267	386.970.266	116.653.467		567.147.000		
14	Puskesmas Kec. Tanjung Priok		52.584.000	44.250.000	7.500.000	104.334.000		
	B A R A T	104.891.000	1.469.236.000	993.968.000		2.568.095.000		
15	Puskesmas Kec. Cengkareng		209.500.000	136.500.000		346.000.000		
16	Puskesmas Kec. Grogol Petamburan	81.280.000	257.780.000	97.793.000		436.853.000		
17	Puskesmas Kec. Kalideres		73.290.000	170.823.000		244.113.000		
18	Puskesmas Kec. Kebon Jeruk		151.692.000	103.584.000		255.276.000		
19	Puskesmas Kec. Kembangan	3.780.000	340.637.000	134.290.000		478.707.000		
20	Puskesmas Kec. Pal Merah		210.636.000			210.636.000		
21	Puskesmas Kec. Taman Sari		78.180.000	70.848.000		149.028.000		
22	Puskesmas Kec. Tambora	19.831.000	147.521.000	280.130.000		447.482.000		
	S E L A T A N	80.450.000	2.129.660.000	556.319.000		2.766.429.000		
23	Puskesmas Kec. Cilandak		368.000.000			368.000.000		
24	Puskesmas Kec. Jagakarsa	18.150.000	164.100.000	145.750.000		328.000.000		
25	Puskesmas Kec. Kebayoran Baru		178.590.000	14.310.000		192.900.000		

NO.	LOKUS PROGRAM		Program Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Total Nilai (Rp)
	NOMENKLATUR KEGIATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		
			Sub Kegiatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten / Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
RINCIAN SUB KEGIATAN (RSK)		Pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah kerja	Kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat Puskesmas	Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit	Pemicuan STBM desa/keurahan prioritas		
26	Puskesmas Kec. Kebayoran Lama		223.979.000	35.090.000		259.069.000	
27	Puskesmas Kec. Mampang Prapatan	28.200.000	130.725.000	50.727.000		209.652.000	
28	Puskesmas Kec. Pancoran		132.150.000	93.850.000		226.000.000	
29	Puskesmas Kec. Pasar Minggu	17.840.000	148.493.000	169.462.000		335.795.000	
30	Puskesmas Kec. Pesanggrahan		289.008.000			289.008.000	
31	Puskesmas Kec. Setiabudi	16.260.000	264.700.000			280.960.000	
32	Puskesmas Kec. Tebet		229.915.000	47.130.000		277.045.000	
	T I M U R	336.007.900	1.810.212.550	1.103.696.550		3.249.917.000	
33	Puskesmas Kec. Cakung		400.984.550	252.300.000		653.284.550	
34	Puskesmas Kec. Cipayung	220.207.900	303.631.000	134.089.110		657.928.010	
35	Puskesmas Kec. Ciracas	90.300.000	34.500.000	80.100.000		204.900.000	
36	Puskesmas Kec. Duren Sawit	15.750.000	275.520.000	128.150.000		419.420.000	
37	Puskesmas Kec. Jatinegara		153.162.000	45.300.000		198.462.000	
38	Puskesmas Kec. Kramat Jati		85.500.000	96.600.000		182.100.000	
39	Puskesmas Kec. Makasar		205.200.000	16.200.000		221.400.000	
40	Puskesmas Kec. Matraman		127.050.000			127.050.000	
41	Puskesmas Kec. Pasar Rebo	9.750.000	22.950.000	350.957.440		383.657.440	
42	Puskesmas Kec. Pulo Gadung		201.715.000			201.715.000	

PENETAPAN LOKUS PROGRAM, NOMENKLATUR KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN RINCIAN SUB KEGIATAN (RSK) SERTA NILAI ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
BIDANG KESEHATAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN UNIT PELAKSANA PERANGKAT DAERAHNYA
TAHUN ANGGARAN 2021

Jenis DAK Fisik Reguler dan Penugasan											
NO	SKPD/UKPD	JENIS DAK FISIK	LOKUS PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN (RSK)	SUB BIDANG	RINCIAN	NILAI ALOKASI PER SUB BIDANG (Rp)	TOTAL NILAI PER JENIS DAK FISIK (Rp)	TOTAL NILAI (Rp)
1	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Reguler	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan, (Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK Fisik)	Pelayanan Dasar	Sarana Cold Chain	1.704.224.768	24.510.913.569	57.230.464.820
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Penyediaan Alat Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (DAK Fisik)	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	CO Analyzer	318.092.481		
2	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Penugasan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Penyediaan Bahan Habis Pakai (DAK Fisik)	Pelayanan Kefarmasian	BMHP, Catridge TCM, RO dan BHP Skinning HIV	22.488.596.320	32.719.551.251	
					Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Penyediaan Makan Tambahan (DAK Fisik)	Penguatan Intervensi Stunting (Major Project)	Pengadaan Makan Tambahan Burnil KEK			
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Penguatan Layanan Ibu dan Anak RS Ponek (DAK Fisik)	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Pengadaan Makanan tambahan Balita Kurus	11.913.418.211		
								Ruang ICU			
								Ruang PCU			
								Ruang Operasi			
								Ruang Laboratorium			
								Ruang CSSD			
								Ruang Radiologi			
								Ruang Bersalin			
Jumlah										57.230.464.820	

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001

Lampiran 5 : Keputusan Kepala Daerah Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 6 Tahun 2021
Tanggal 9 Januari 2021

PENETAPAN LOKUS PROGRAM, NOMENKLATUR KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN RINCIAN SUB KEGIATAN (RSK) SERTA NILAI ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
FISIK DAN NON FISIK BIDANG KESEHATAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN UNIT PERANGKAT DAERAHNYA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JENIS DAK	WILAYAH	KATEGORI/JENIS RINCIAN	ALOKASI PER KATEGORI/JENIS RINCIAN (Rp)	ALOKASI PER WILAYAH (Rp)	ALOKASI PER JENIS DAK (Rp)	TOTAL ALOKASI DAK (Rp)	
1.	DAK Nonfisik	Provinsi	BOK Provinsi	2.868.157.000	2.947.587.000	19.562.371.000		
			BOK Farmasi dan Alat Kesehatan	79.430.000				
		Kabupaten/Kota	BOK Puskesmas	11.902.575.000	16.614.784.000			76.792.835.820
			Stunting	4.712.209.000				
2	DAK fisik	Provinsi	Reguler	24.510.913.569	57.230.464.820	57.230.464.820		
			Penugasan	32.719.551.251				
			Jumlah Total					76.792.835.820

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001



KARTU KENDALI

B

No. Urut :

6

Kode :

JAHUN 2021

Tgl. M / K :

24 Januari 2021

Indek

Dari / Kepada *)

Hal / Isi ringkas

Penetapan Lokasi Program, nomenklatur kegiatan sub kegiatan Dak 2021

Tgl. Srt. : 21/1/2021

No. Srt. : GJAHUN 7521

Lampiran :

Pengolah

PDA

Diteruskan

Disimpan

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Lembar kedua



KARTU KENDALI

No. Urut : 6	Kode : 74141 7021	Tgl. M / K : 24 Januari 2021
Indek	Dari / Kepada *)	

Hal / Isi ringkas

Penetapan Lokasi Program / nominator
kegiatan Sub kegiatan Dik 2021

Tgl. Srt. : 4/1/2021	No. Srt. : 67414 7021	Lampiran :
Pengolah DA	Diteruskan	Disimpan

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ketiga

RIWAYAT DISTRIBUSI PERBAL NASKAH DINAS

No.	Pejabat Dinas	Nama	Paraf	Tanggal		Keterangan
				Diterima	Diserahkan	
1	Pembuat (Kasubag/Kasie)	Aad	P			
2	Pemeriksa (Ka Sekretariat/ Kabid)	Dani	Jr			
3	Pengedar (Sekpeng Sekretariat/Bidang)					
4	Pentaklik (Subag Umum) a. Pengelola Perbal	Ham	H		4/1/2021	tersebut ok 15/1/2021
	b. Kasubag Umum	Sueh	9			
5	Sekpeng Sekretariat	W. Haulin	(			
6	Kepala Sekretariat	dr. Ani R. Muli	P			
7	Sekpim	Marion	HR	20/1/21	20/1/21	
8	Arsiparis					

PESBAL NASKAH DINAS

Jenis Surat

- ☐ Instruksi
☐ Surat Edaran
☐ Surat Bina
☐ Surat Keterangan

- ☐ Surat Tugas
☐ Surat Penintah Perjalanan Dinas
☐ Surat Undangan
☐ Nota Dinas

- ☐ Telaahan Staf
☐ Berita Acara
☐ Surat lainnya

Sifat

- ☐ Amal Segera (Masa 7 x 24 jam)
☒ Segera (Masa 7 x 24 jam)

- ☐ Penting (Masa 3 x 24 jam)
☐ Biasa (Masa 5 hari kerja)

Perihal

SK DAK 2021

Ditujukan
Kepada

Ka. Dinas kesehatan

Penyusun

PAP.

Diajukan Kepada Atasan Langsung
 Tanggal / /
 Pukul :
 Catatan

Hasil Pemeriksaan Oleh Atasan Langsung
☐ Dikembalikan
☐ Disetujui
 Dengan keterangan:

Tanggal
 Pukul
 Paraf

7.1.2021

Diajukan Kepada Atasan Langsung
 Tanggal / /
 Pukul :
 Catatan

Hasil Pemeriksaan Oleh Atasan Langsung
☐ Dikembalikan
☐ Disetujui
 Dengan keterangan:

Tanggal
 Pukul
 Paraf

Diajukan Kepada Atasan Langsung
 Tanggal / /
 Pukul :
 Catatan

Hasil Pemeriksaan Oleh Atasan Langsung
☐ Dikembalikan
☐ Disetujui
 Dengan keterangan:

Tanggal
 Pukul
 Paraf

Atasan Langsung

Nama dr. Rasyid Mullih Matis
 NIP 198010152014031006
 Jabatan Kepala Seksi Perencanaan Anggaran dan
 Pembiayaan

Verifikasi Akhir

Tanggal
 Pukul

7.1.2021

P E R B A L N A S K A H D I N A S

DI ISI OLEH	UNIT/SUB UNIT/CTU	DI ISI OLEH BIRO UMUM / BAGIAN UMUM SETKODYA
1. Dikerjakan oleh	: Ka.Seksi Perencanaan, Anggaran dan Pembiayaan	1. Diterima di Penerimaan Surat : Pengendali Surat
2. Diperiksa oleh	: Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Informasi	2. Dinomori oleh : Pengendali Surat
3. Diedarkan oleh	: Sekpeng Perencanaan, Anggaran dan Pembiayaan	3. Diketik oleh : Pengendali Surat
4. Net telah disetujui oleh/Sub Unit/CTU Pengonsep	: Kepala Bidang Perenc. & Pengendalian dan Informasi	4. Di ta'lik oleh : Sub. Bagian Umum
		5. Diterima di pengirim Surat : Caraka
		6. Dikirim oleh : Caraka
		7. Perbal dan pertinggal disimpan oleh : Penata Arsip

D I M A J U K A N P A D A T G L , ...

Hal / Judul Naskah Dinas :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN LOKUS PROGRAM, NOMENKLATUR KEGIATAN, SUB KEGIATAN (RSK) SERTA NILAI ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK DAN NON FISIK BIDANG KESEHATAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN UNIT PERANGKAT DAERAHNYA TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor
Sifat
Lampiran

Jakarta, ... 2020

Jenis Naskah Dinas / Alamat yang dituju

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHATAN
PROVINSI DKI JAKARTA

PEMARAF SERTA

1. Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta
2. Plt. Wakil Kepala Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta

TEMBUSAN ;

1. Bidang/Seksi yang terkait;
2. Penanggungjawab Kegiatan;

DITETAPKAN OLEH :
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dr. WIDYASTUTI, MKM
NIP 196406291989122001